

BUPATI INGATKAN TETAP HARUS JAGA PROKES

## 1.200 Orang Ikut Vaksinasi Massal

**NGAGLIK (KR)** - Lebih dari 1.200 orang mengikuti vaksinasi Covid-19 secara massal di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya, Kamis (22/4). Peserta vaksin terdiri dari 309 karyawan BBPPMPV Seni dan Budaya, 224 karyawan PPPPTK Matematika, 174 guru serta 524 takmir masjid dan tokoh agama di wilayah Sleman.

Bupati Sleman Kustini langsung meninjau pelaksanaan vaksin tersebut, didampingi Kepala BBPPMPV Seni dan Budaya Dr Sarjilah MPd dan Kabag TU BBPPMPV Seni dan Budaya Marsukhan Budiyanto MM. "Takmir masjid termasuk menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin ini

karena mereka termasuk pelayanan publik. Di-harapkan dengan vaksin ini tidak akan muncul klaster-klaster baru di bulan Ramadan," jelas Bupati.

Menurutnya, hingga kini sudah ada 1.500 takmir masjid yang telah divaksin dari target total 6.000 orang. "Begitu ada suplai

vaksin dari provinsi, langsung dilakukan secepatnya sehingga akan semakin banyak yang memperoleh vaksin di wilayah Sleman," imbuhnya.

Di hadapan para peserta vaksinasi, Bupati menekankan bahwa mereka yang sudah divaksin bukan jaminan tidak akan terpapar Covid-19. Untuk itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. "Begitu keluar rumah harus tetap mematuhi prokes," tegasnya.

Sedang Sarjilah menyatakan, BBPPMPV Seni dan Budaya sebagai UPT di bawah Kemendikbud yang ada di wilayah Sleman berusaha membantu program vaksinasi Covid-

19, khususnya di Sleman. "Untuk pelaksanaan vaksin kali ini kami memfasilitasi tempat dengan harapan mempermudah masyarakat sekitar untuk mendapatkan vaksin," jelasnya.

Masyarakat antusias mengikuti vaksinasi di BBPPMPV Seni dan Budaya itu, bahkan ada sejumlah warga yang tidak mendapatkan undangan ikut datang. Dari peserta yang mendapat undangan vaksinasi, ada sejumlah orang yang batal mendapat vaksin karena tidak lolos skrining kesehatan. Setelah 28 hari dari dosis pertama, peserta akan mendapat vaksin dosis kedua. (Jan)-f



Bupati Kustini didampingi Kepala BBPPMPV Seni dan Budaya Sarjilah meninjau vaksinasi massal. KR-Janu Riyanto

## 19 Satker Polda DIY Tandatangani Pakta Integritas



Kapolda DIY menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas. KR-Dok Humas Polda DIY

**SLEMAN (KR)** - Polda DIY mencanangkan pembangunan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas di Mapolda DIY, Kamis (22/4). Pencanaan merupakan langkah awal dan bagian dari reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerin-

tahan yang baik, efektif, efisien dan pelayanan prima.

"Ada 19 Satker (Satuan Kerja) Polda DIY yang hari ini melakukan penandatanganan pakta integritas. Pencanaan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," terang Kapolda DIY Irjen Pol Drs Asep Suhendar.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto SIK mengatakan, Satker yang mencanangkan zona integritas adalah, Itwasda, Biro Ops, Rorena, Rolog, Reskrim, Reskrim

Narkoba, Dit Samapta, Dit Polair, Dit Tahti, Brimob, Bid Dokkes, Bid Humas, Bit TIK, Bid Keu, Bid Propam, Bid Kum, SP-KT, Sripim dan Setum. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan upaya penting, karena mencerminkan tekad dan komitmen bersama. Tujuannya, untuk menjadikan Polda DIY menjadi zona yang berintegritas, sebagai wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani," pungkaskabid Humas. (Ayu)-f

## Tripartit Sleman Pantau Pemberian THR

**SLEMAN (KR)** - Semua perusahaan di Kabupaten Sleman diwajibkan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja pada H-7 Lebaran. Untuk memastikan itu, Tripartit Sleman akan melakukan pemantauan di perusahaan-perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman Sutiasih menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran (SE) No M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR keagamaan Tahun 2021, semua pengusaha wajib memberikan THR kepada buruh atau pekerja. Untuk pekerja yang sudah bekerja selama satu tahun atau lebih diberikan satu kali gaji. "Sedangkan bagi pekerja yang bekerja lebih satu bulan tapi kurang dari satu tahun, diberikan THR secara proporsional," katanya kepada KR, Kamis (22/4).

Untuk memastikan semua pengusaha atau perusahaan memberikan THR, Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja, akan melaku-

kan pemantauan sebelum H-7. Dengan harapan pada H-7 Lebaran, semua perusahaan telah memberikan THR. "Tripartit Sleman akan memantau langsung ke lapangan. Agar para pengusaha memberikan THR kepada pekerja atau buruh bisa tepat waktu," ujarnya.

Bagi perusahaan yang belum sanggup memberikan THR pada H-7, bisa melakukan perjanjian secara tertulis. Dimana pemberian THR dapat diperpanjang sampai H-1. "Ketika ada perusahaan tidak bisa H-7, boleh dilaksanakan H-1. Tapi harus ada kesepakatan tertulis dengan pekerja," tegas Sutiasih.

Untuk menerima aduan atau konsultasi, Disnaker Sleman telah membuka posko aduan dan pelaporan THR 2021. Selain itu dapat mengakses [www.nakertrans.jogjaprovo.go.id](http://www.nakertrans.jogjaprovo.go.id) "Pekerja atau perusahaan bisa langsung datang ke kantor atau mengakses secara online. Untuk website itu merupakan posko bersama Disnakertrans DIY dan kabupaten/kota." (Sni)-f

## Regulasi Pengisian JPT Diperbaharui

**SLEMAN (KR)** - Puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Sleman mengikuti sosialisasi penerapan manajemen kinerja, tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aula Lantai 3 Kantor Setda Sleman, Kamis (22/4). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini dibuka Bupati Sleman Kustini.

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber yaitu pertama Komisioner KASN, Rudiarto Sumarwono dengan materi pembahasan terkait Pembinaan Sistem

Manajemen ASN bagi Pemda pasca Pilkada serentak. Sedangkan narasumber kedua Asisten KASN Bidang Pengisian JPT Wilayah I John Ferianto dengan materi sosialisasi yaitu terkait disiplin Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin PNS.

Bupati berharap dengan adanya penyelenggaraan sosialisasi tersebut ada pembaharuan regulasi terkait pengisian JPT, ketentuan mengenai mekanisme JPT pasca pilkada serentak tahun 2020. (Has)-f

KESETARAAN GENDER MENJADI ARUS UTAMA

## Tak Ada Diskriminasi Naker Perempuan

**SLEMAN (KR)** - Pemkab Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi diskriminasi bagi perempuan, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan Bupati Sleman Kustini saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk 'Dakwah dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perempuan' di Smart Room Dinas Kominfo Sleman, kemarin. Acara yang digagas UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta ini juga diikuti oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah.

Bupati mengatakan, implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sleman sudah masuk ke dalam semua instansi atau SKPD di lingkungan Pemkab Sleman. Setidaknya ada dua kegiatan yang responsif gender pada setiap SKPD. Kebijakan tersebut berdasarkan SK Kepala Bappeda selaku Ketua PUG.

Terkait tenaga kerja (naker), Bupati memaparkan data penempatan tenaga kerja, baik melalui program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal

(AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN) selama 3 tahun (2018-2020). Penempatan tenaga kerja wanita tahun 2018 untuk laki-laki 1.406, dan perempuan 833. Sedangkan untuk tahun 2019, untuk laki-laki 798 dan perempuan 828. Adapun penempatan tenaga kerja wanita tahun 2020 untuk laki-laki 426 dan perempuan 447.

"Kondisi di atas memperlihatkan bahwa tenaga kerja wanita lebih diminati oleh perusahaan-perusahaan. Hal tersebut dilandasi alasan bahwa kaum wanita lebih sabar, tekun dan teliti dalam bekerja. Serta tidak banyak tuntutan," ucap Bupati. (Has)-f

DOSIS KEDUA DISELESAIKAN MEI

## Vaksinasi Tendik Dosis Pertama Tuntas



Pelaksanaan vaksinasi tenaga pendidik Sleman. KR-Istimewa

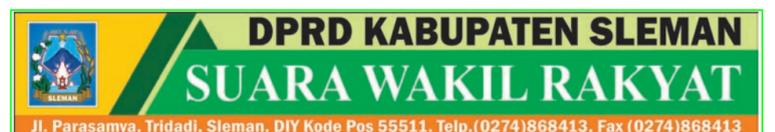
**SLEMAN (KR)** - Dinas Kesehatan Sleman menargetkan vaksinasi untuk tenaga pendidik di Sleman

bisa selesai dalam minggu ini. Setelah itu vaksinasi dosis kedua direncanakan akan diselesaikan pada

bulan Mei.

"Ini gelombang terakhir untuk tenaga pendidik, targetnya minggu ini selesai. Untuk vaksin ke dua akan dilaksanakan 28 hari kemudian," ungkap Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sleman dr Novita Krisnaeni di sela vaksinasi massal di Ngaglik, Kamis (22/4).

Sementara Bupati Kustini mengapresiasi kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Sleman ini. Vaksinasi bagi tenaga pendidik merupakan hal yang sangat penting. Sebab, saat kegiatan belajar mengajar tatap muka dibuka pada bulan Juli nanti, diharapkan para tenaga pendidik telah divaksin seluruhnya. "Bagi tenaga pendidik yang merasa belum divaksin, silakan secepatnya koordinasi," ujarnya. (Has)-f



## RPJMD Harus Cerminkan Kebutuhan Rakyat

**SLEMAN (KR)** - Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, sebagai sarana untuk merealisasikan janji politik saat kampanye Pilkada kemarin. Untuk itu birokrasi harus bisa menerjemahkan janji politik itu secara teknokrasi. Selain itu, perlu adanya intervensi kebijakan agar 6 visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman dapat terealisasi dengan baik serta proporsional.

"Apa yang telah menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati, secara teknokrasi harus diterjemahkan oleh birokrasi. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector," kata anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PAN Respati Agus Sasangka SIP, Kamis (22/4).

Sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Fraksi PAN ingin memastikan penyusunan RPJMD tidak menampilkan target-target semata. Namun target itu harus didasarkan dengan realitas di lapangan maupun kemampuan keuangan yang ada. Selain itu RPJMD juga harus mencerminkan kebutuhan rakyat. "Kami menilai ada beberapa kelemahan dari penerjemahan dari eksekutif. Ada beberapa parameter yang belum pada titik ideal," ucap Ketua Fraksi PAN ini.

Menurut pria yang kerap dipanggil Ade ini, untuk target kinerja pendukung peningkatan sarpras kondisi mantap, seharusnya bisa ditingkatkan lagi jika melihat kondisi di lapangan. Bahkan target indeks kualitas lingkungan hidup seharusnya Sleman bisa lebih baik lagi. "Sleman seharusnya mampu mewujudkan

Respati Agus Sasangka SIP Anggota DPRD Sleman dari PAN



Respati Agus Sasangka SIP

semua rumah sudah layak huni. Kemudian indeks kualitas air lebih baik lagi karena Sleman berada di sumber mata air," kata anggota Komisi A DPRD ini.

Sedangkan untuk target pertumbuhan ekonomi, Ade kurang sependapat. Sebelum pandemi, memang pertumbuhan ekonomi di Sleman sekitar 5 persen dan sekarang ini menjadi 3,40 persen. Hal itu dapat dimaklumi karena pandemi Covid-19. Namun yang tidak relevan, pada Tahun 2021 ditargetkan pertumbuhan ekonomi menjadi 2 persen.

"Memang ekonomi sudah jalan tapi belum pulih dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector," kata anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PAN Respati Agus Sasangka SIP, Kamis (22/4).

Untuk indeks desa membangun desa mandiri, seharusnya Tahun 2026, sebanyak 86 kalurahan bisa masuk desa mandiri. Mengingat kondisi demografi dan geografi di 86 kalurahan relatif sama. Sementara eksekutif baru menargetkan 34 kalurahan. Untuk mendukung capaian itu, sebenarnya eksekutif bisa intervensi melalui kebijakan atau program. Sehingga apa yang telah dijanjikan dalam kampanye, dapat terwujud dengan baik dan proporsional. "Jadi target yang dikira kurang optimal, perlu diintervensi supaya tercapai yang diinginkan. Supaya apa yang menjadi target dalam RPJMD bisa terlaksana dengan baik. Sehingga visi bupati dan Wakil Bupati terwujudnya masyarakat yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong bisa terealisasi," pungkask Ade. (Sni)-f